

## BAB II

### GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

#### A. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman membentang antara  $107^{\circ} 15' 03''$  dan  $100^{\circ} 29'$  dan  $30''$  Bujur Timur, serta  $70 34' 51''$  dan  $70 47' 03''$  Lintang Selatan dengan ketinggian wilayah antara 100 hingga 2.500 meter dari permukaan laut. Rentang wilayah terjauh dari utara ke selatan sekitar 32 km dan dari timur ke barat lebih kurang 35 km.

Dengan luas wilayah 57.482 hektar atau sebesar 18% dari luas wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman memanfaatkan sebagian besar lahan untuk kegiatan pertanian berupa lahan sawah 23.361 Ha (40,64%), 6.440 Ha (11,20%) lahan tegalan, 18.832 Ha (32,76%) lahan pekarangan, dan lahan untuk lain-lain seluas 8.849 Ha (15,39%). Perkembangan penggunaan lahan sawah menunjukkan jenis tanah sawah berkurang sekitar 0,23 Ha/tahun.

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu:

1. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kecamatan Tempel, Pakem, dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumberdaya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.
2. Kawasan timur meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3. Kawasan tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa.
4. Wilayah barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Tempel, dan Gamping. Selain itu wilayah kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:

1. wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
2. wilayah suburban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

## B. Kondisi Pemerintahan dan Kependudukan

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, 1.212 padukuhan, 2.886 RW, dan 6.961 RT. Dengan melihat posisi wilayah Kabupaten Sleman sebagai *hinterland* dari kota Yogyakarta, maka dari 86 desa yang ada, sebanyak 27 desa dikategorikan sebagai desa perdesaan, sedangkan 59 desa yang lain dikategorikan sebagai desa perkotaan. Dengan kata lain, sekitar 69% desa di Kabupaten Sleman telah berkembang lebih cepat dari desa yang lain

Pemerintah Kecamatan Depok yang mencakup tiga desa yaitu Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo, merupakan wilayah yang menunjukkan pertumbuhan paling cepat. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah yang berimpit dengan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan di DIY, dan pusat aktivitas perekonomian. Pertumbuhan yang cepat kawasan ini mendorong munculnya wacana untuk memecah Pemerintah Kecamatan Depok menjadi dua wilayah pemerintahan.

Sementara itu pertumbuhan penduduk mengalami trend yang selalu naik. Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2002, jumlah penduduk Sleman mencapai 874.795 (naik 2,02%) jiwa yang terdiri dari 432.895 laki-laki dan 411.900 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 57.482 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Sleman rata-rata sebanyak 1.522 jiwa/km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat antara lain Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, dan Godean.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman tergolong tinggi dibanding dengan kabupaten lain di DIY. Migrasi masuk lebih besar dibandingkan dengan migrasi keluar. Hal ini merupakan konsekuensi Sleman sebagai daerah tujuan pendidikan dan karena daya tarik hunian di Sleman cukup tinggi. Sehingga pertumbuhan perumahan di Sleman mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2002 penduduk yang datang mencapai 12.224 orang terdiri dari 6.244 laki-laki dan 5.980 perempuan.

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang terus bertambah ini, tidak hanya akan mempengaruhi terhadap aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga pada aspek pemanfaatan ruang kota, terlebih lagi dengan adanya krisis ekonomi pada akhir dekade 1990an dan awal 2000an, yang berakibat semakin tingginya migrasi masuk ke kota dengan tujuan salah satunya mencari pekerjaan.

Hal itu menjadi masalah kota karena pada saat yang bersamaan kemampuan Kabupaten Sleman untuk membuka kesempatan kerja sangat terbatas, sehingga para pendatang tidak dapat terserap dalam dunia kerja formal dan mereka mencari pilihan di sektor informal dengan membuka usaha-usaha PKL.

mengalami keterbatasan, sehingga yang terjadi adalah tidak terdapat kapasitas yang cukup untuk menampung kegiatan PKL dalam lokasi yang legal.

### C. Kondisi Perekonomian

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990an telah mengubah keadaan perekonomian masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Sleman. Keadaan tersebut membuat daya produksi dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini mulai berangsur membaik secara pelan, pada awal tahun 2000an yang diindikasikan oleh perubahan PDRB.

Berdasarkan penilaian terhadap sektor dalam PDRB, pertumbuhan positif yang mengalami peningkatan secara relatif konstan adalah sektor-sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan). Kelompok ini mengalami pertumbuhan positif, dengan kontribusi pada PDRB sebesar 29,37% pada tahun 2003. Sedangkan sektor-sektor tersier masih menjadi kontributor dominan, namun mengalami sedikit penurunan. Sektor tersier ini terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi terbesar dalam kelompok sektor tersier ini dialami oleh sektor rata-rata naik 1,62% per tahun.

Adapun kontribusi kelompok sektor primer mengalami penurunan rata-rata 4,38% per tahun, dengan penurunan terbesar pada sektor pertanian rata-rata pertahun menurun sebesar 3,88%. Kondisi ini sejalan dengan penurunan luas lahan pertanian terutama sawah rata-rata pertahun berkurang 0,23 hektar per tahun.

Selama 5 tahun pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut karena terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Pada tahun 1999 mulai tumbuh meskipun hanya 1,93% kemudian naik menjadi 3,96% pada tahun 2000, kemudian turun lagi pada tahun 2001 menjadi 3,68%. Tahun 2002 pertumbuhan ekonomi naik lagi menjadi 4,74%, dan mulai tahun 2003, pertumbuhan ekonomi

#### D. Kondisi PKL di Lokasi Penelitian

Kawasan tumbuh cepat di Kabupaten Sleman berada di wilayah aglomerasi Yogyakarta, yaitu wilayah yang berdekatan dengan Yogyakarta sebagai pusat kota. Wilayah tersebut meliputi Depok, Mlati, Berbah, dan Gamping. Di antara wilayah tersebut, Depok merupakan wilayah yang paling banyak terdapat aktivitas PKL.

Di kawasan tumbuh cepat ini kegiatan yang dominan adalah perdagangan dan jasa, sehingga di wilayah ini memiliki potensi berkembang sektor informal, termasuk di dalamnya adalah PKL. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa titik-titik konsentrasi PKL terjadi di kawasan tumbuh cepat mengikuti ruas-ruas jalan raya yang ramai, antara lain kawasan di tepi jalan Yogya-Kaliurang (UGM dan sekitarnya), Yogya-Prambanan (Ambarukmo, Babarsari dan sekitarnya), Jl. Gejayan (Mrican), dan Jl. Colombo (UNY dan sekitarnya).

Sebaran aktivitas PKL di Kabupaten Sleman berada di wilayah Kecamatan Depok lebih kurang 312 PKL, Kecamatan Mlati 158 PKL, Kecamatan Ngaglik 141 PKL, dan Kecamatan Gamping 92 PKL. Potensi PKL terbesar di wilayah Kecamatan Depok, mengingat di kawasan ini relatif paling ramai. Di wilayah Depok juga merupakan lingkungan kampus yang notabene lingkungan mahasiswa. Berdasarkan data yang ada di Bagian Pengembangan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tahun 2003, konsumen terbanyak PKL di kawasan tumbuh cepat adalah mahasiswa sebanyak 52%, selebihnya adalah masyarakat umum. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara lokasi aktivitas PKL dengan lokasi aktivitas mahasiswa.

Para PKL ini umumnya menempati lahan publik, seperti trotoar, bahu jalan, taman kota, atau lahan kosong. Mereka menempati lahan dengan cara sewa kepada pemilik atau tanpa sewa. Sebagian dari mereka meninggalkan media dagangnya seperti gerobak dan tenda, di tempatnya berjualan. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan yang kumuh. Namun ada juga yang sifatnya *mobile*, dimana media dagang dibawa pulang ketika tidak sedang berjualan. Jenis usaha PKL juga turut menentukan efek samping yang ditimbulkan oleh kegiatan PKL. PKL jenis usaha makanan segar, berpotensi menimbulkan kotor lingkungannya

membuang air limbah di tepi jalan atau di bibir lobang *street inlet* (lobang saluran drainase).

Terhadap perkembangan PKL di wilayah Sleman, Pemerintah Kabupaten telah berupaya melakukan pengelolaan secara kooperatif. Ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi tetapi ada hal yang tidak bisa ditoleransi. Pengelolaan PKL tindakan preventif, maupun kuratif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara membuat regulasi PKL melalui Peraturan Daerah, sedangkan tindakan kuratif dilakukan dengan tindakan operasional di lapangan dengan cara memberikan teguran, peringatan, atau tindakan penggusuran sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*). Kepedulian Pemda terhadap aktivitas PKL ini dapat ditunjukkan dengan terlaksananya program studi banding PKL ke Singapura pada pertengahan tahun 2004 dengan melibatkan sedikitnya sepuluh orang perwakilan paguyuban PKL. Di Singapura para PKL dapat melihat bagaimana PKL tertata dengan teratur dan menarik di pusat-pusat kota sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Dengan cara seperti itu